

**Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas
Nelayan Pulau Kecil
(Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang,
Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)**

*Social Security Of Social Economic Women In Fisheries Community Of Small Islands
(Case of Salemo Island, Mattiro Bombang Village, Liukang District,
Pangkajene Kepulauan Regency, South Sulawesi)*

Hasbi¹, Mahmud Tang², Abdul Hayat³

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar, tlp/fax: (0411) 585024

Email: hasbiukm@yahoo.com

²Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

³Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia,
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat

diterima 18 Januari 2019 diperbaiki 22 April 2019 disetujui 29 April 2019

Abstract

In rural South Sulawesi there are 646, 210 thousand people or 12.30% of the poor. They are small farmers who do not have agricultural land and also small fishermen who do not have adequate fishing equipment so that it is not enough to guarantee basic needs his family. One group included in this category is Women Socio-Economic Prone (PRSE). The research objective is to describe social conditions economics of women socio-economic prone to fishing communities and describe social security practices in an effort to fulfill their basic needs. Research methods is qualitative descriptive with the type of case study. Data obtained through interviews depth and observation, then analyzed by means of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study found that women were prone to socio-economic conditions in the fishing community on Salemo island, Mattiro Bombang village, Liukang sub-district is not able to fulfill their basic needs. In practice social security applies the principle of lead balik (situlung-tulung), love each other (sipammase-mase), appropriateness (assitinajang), mutual visit (silokkai). Suggestions to the government, careful arrangement needs to be done about the category of poor and mediocre women in socio-economic vulnerability, it needs to improve budget allocation to increase income so that they no longer owe it to paggadde-gadde, increasing allocations for education, health, clean water, and the environment.

Keywords: *social security; women prone to socio-economic; small island fishermen.*

Abstrak

Di pedesaan Sulawesi Selatan terdapat 646,210 ribu jiwa atau 12,30% penduduk miskin. Mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian dan juga nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai sehingga tidak cukup menjamin kebutuhan dasar keluarganya. Salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan dan mendeskripsikan praktik sekuritas sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan, selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan di pulau Salemo, desa Mattiro Bombang, kecamatan Liukang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam praktik sekuritas sosial berlaku prinsip timbal balik (*situlung-tulung*), saling mengasihi (*sipammase-mase*), kepantasan (*assitinajang*), saling mengunjungi (*silokkai*). Saran kepada pemerintah, perlu dilakukan penataan secara cermat tentang kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin dan diambang batas miskin., perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka tidak lagi berhutang pada *paggadde-gadde*, meningkatkan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.

Kata Kunci: *sekuritas sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; nelayan pulau kecil.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin di pedesaan Indonesia mencapai 15,81 juta jiwa atau sekitar 13,20 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 7,02 persen. Adapun di pedesaan Sulawesi Selatan terdapat 646.210 ribu jiwa atau 12,30 persen. Komposisi penduduk lebih banyak di pedesaan, maka jumlah penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan. Mereka adalah lapisan petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk menjamin kebutuhan dasar keluarganya dan juga para nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai sehingga sulit untuk bersaing dengan nelayan modern (Tang, dkk. 2016). Salah satu kategori sosial yang juga menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh warga komunitas desa-desa pulau kecil, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah namun belum dapat dikatakan berhasil (Tang, dkk. 2016). Perlu dikaji lebih dalam lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh warga komunitas pulau-pulau kecil sendiri dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh warganya, yang dilakukannya berdasarkan potensi budaya yang dimiliki (*cultural based*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah; (i) bagaimana kondisi sosial ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi; (ii) bagaimana praktik sekuritas sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan.

Konsep sekuritas sosial secara konvensional adalah dari International Labour Organization (ILO) yang berarti, *“the protection which society provides for its members, through a series of public measures, against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment injury, unemployment, old age and death; the provision of medical care; and the provision of subsidies for families with children.”* (Woodman, 1988).

Dalam penelitian ini, sekuritas sosial dilihat sebagai suatu konsep analitis yang berkenaan dengan “fungsi sosial” tertentu. Istilah sekuritas sosial digunakan untuk mengacu kepada masalah sosial. Dalam pengertian yang luas sekuritas sosial dapat ditujukan kepada usaha dari individu, kelompok, keluarga, warga satu desa, swasta dan institusi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan dasar dari anggota masyarakat seperti: bahan makanan yang memadai, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih untuk mereka memenuhi standar kehidupan yang sesuai dengan norma—masyarakat. Pendekatan tersebut dapat disebut pendekatan fungsional. Pengertian sekuritas sosial tidak hanya dibatasi pada fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga sumber bantuan itu asalkan berfungsi sosial dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penerima bantuan.

Beberapa penelitian tentang sekuritas sosial telah dilakukan oleh Mahmud Tang, 1996; Mahmud Tang, dkk 2002, 2005, 2012, dan 2016. Dari beberapa penelitian tersebut berfokus pada keluarga miskin, tetapi belum ada yang berfokus pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Begitu pula hasil-hasil penelitian Benda-Beckmann, F.Von, *et.al* dan penelitian-

penelitian lainnya belum ada yang fokus pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial (dikutip oleh Edi Suharto, 2006: 134) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Uraian yang terperinci mengenai pengukuran kemiskinan dari BPS, BKKBN dan Bank Dunia, dapat dilihat dalam Mafruhah (2009: 12-17).

Jika kemiskinan dilihat dari faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat, maka faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan disebabkan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja atau malas, melainkan disebabkan “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja (Bayo, 1996).

Tulisan tentang upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, (Ahmed Ali dkk, 2012) dalam penelitiannya Intervensi Pengadaan Air dan Sanitasi oleh pemerintah di District Abbottabad Pakistan; Imran Qureshi, dkk (2012) tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan; dan Nweke (2012) tentang program *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk mengurangi separuh dari kemiskinan dan kelaparan. Mulai tahun 2016, program tersebut telah digantikan oleh program *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana salah satu target sarasannya adalah mengakhiri kemiskinan.

Hubungan antara konsep “kemiskinan” dengan konsep “Perempuan Rawan Sosial Ekonomi” dilihat dalam pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagai berikut: “Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” (Peraturan Mensos No. 12, 2012:7). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dapat dikategorikan “miskin” karena “tidak menghasilkan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jumlah mereka secara nasional pada tahun 2011 mencapai 8,96 persen atau sekitar 10,73 juta jiwa. Di perkotaan mencapai 5,90 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 12,03 persen (Kemensos, 2012:36). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak terjadi peningkatan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi, terutama di pedesaan.

Orisinalitas penelitian ini membuktikan bahwa selama ini penelitian

komunitas nelayan di Sulawesi Selatan umumnya tentang nelayan laki-laki. Begitu pula topik sekuritas sosial pada nelayan selama ini lebih fokus pada keluarga miskin yang kepala keluarganya laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah; (i) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan; (ii) mendeskripsikan praktik sekuritas sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar perempuan rawan sosial ekonomi pada komunitas nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada umumnya, khususnya untuk pelayanan sekuritas sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dan sekaligus menjadi bahan pendidikan karakter bangsa.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu Pulau Salemo Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi awal yang diperoleh bahwa di pulau itu terdapat banyak warga komunitas nelayan yang tergolong Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Informan dipilih dari orang yang layak dijadikan informan, mulai dari informan kunci dan informan-informan lainnya (informasi awal dari seorang pegawai kantor Desa Mattiro Bombang).

Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengamatan. Di samping itu untuk mengumpulkan gagasan warga masyarakat secara kolektif maka dilakukan pula FGD. Pengumpulan data tentang pemberian bantuan berupa benda-benda, tenaga (jasa), dan uang kepada perempuan rawan sosial ekonomi, sarana-prasana, dan lingkungan permukiman, dilakukan

dengan pengamatan. Alat bantu penelitian yang digunakan adalah *voice recorder* dan kamera.

Data yang dikumpulkan direduksi menjadi pokok temuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk naratif. Kegiatan terakhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan. Komponen analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian interaktif yang dilakukan terus-menerus sampai akhirnya diperoleh kesimpulan yang akurat.

C. Kondisi Sosial Ekonomi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Praktik Sekuritas Sosial, dan Sekuritas Sosial Pemenuhan Kebutuhan Pokok.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci (kepala desa) dan kepala dusun, informan ahli (para nelayan senior) dan informan biasa, penulis menyimpulkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang disebut “miskin” (Bugis=*maperi*) adalah mereka yang penghasilannya terlalu kecil dan tidak menentu sepanjang tahun sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang rumahnya kelihatan cukup baik atau orang bergelar haji, bukan jaminan bahwa sudah lepas dari kemiskinan. Banyak di antara mereka yang rumahnya lebih dari layak huni, yang mereka sebut sebagai “peninggalan” dari masa kejayaan (pada saat hasil tangkapan melimpah sekitar tiga puluh tahun yang lalu), namun kebutuhan dasar lainnya kurang dapat dipenuhi pada masa sekarang ini. Mereka dikategorikan pas-pasan (diambang batas miskin). Bahkan diantara mereka ada sepuluh orang

haji (perempuan) yang dikategorikan miskin karena tidak ada lagi pencari nafkahnya, dan kehidupannya susah (*maperi*).

Mengenai jumlah pasti Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Pulau Salemo penulis tidak peroleh karena tidak ada catatan tentang hal itu di kantor Desa Mattiro Bombang. Hasil wawancara penulis dengan informan kunci diperoleh jumlah yang dihitung sebanyak 73 orang. Kepala desa mengakui pernah mengusulkan 600 (enam ratus) kepala keluarga (termasuk perempuan rawan sosial ekonomi) untuk memperoleh beras miskin (*raskin*). Menurut kepala desa diantara 378 kepala keluarga di Pulau Salemo ada sekitar 95 % nelayan (sekitar 359 kepala keluarga). Sedangkan di antara sekitar 359 kepala keluarga itu ada sekitar 80 % keluarga miskin (sekitar 287 kepala keluarga).

Berdasarkan informasi dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sendiri, setiap orang dari mereka menganggap dirinya miskin beralasan bahwa penghasilannya tidak menentu. Pada bulan Juli misalnya, musim rumput laut sudah lewat, jadi akses pada pekerjaan mengikat bibit rumput laut yang menjadi sumber penghasilan tambahan sudah tidak ada lagi.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Berdasar pengakuan mereka bahwa meskipun mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan makan dalam arti mereka sudah mau memasak lalu pergi meminjam (beli dengan tidak kontan) beras pada penjual (*paggadde-gadde*), tetapi mereka bersyukur karena semuanya makan nasi beras dan tidak ada lagi yang makan nasi jagung seperti pada masa yang lalu. Pada masa yang lalu menurut WN (penduduk tertua di Pulau Salemo, umur sekitar 85

tahun) tidak ada yang tidak dimakan, nasi jagung, pisang, sukun pun dimakan sebagai makanan pokok. Saat ini kami semua makan nasi beras” (*iya riolo de’gaga tenri yanre, nanre barelle,o otti, baka riyandreto. Makkukkuae pada inanre bare’ riyandre*).

Mengenai frekuensi makan, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori miskin dan diambang miskin atau pas-pasan, umumnya makan dua kali sehari nasi dan lauk-pauk, yaitu pada siang dan malam hari. Pada waktu pagi mereka minum teh atau kopi. Bagi yang mampu minum teh atau kopi dan makan kue-kue di waktu pagi. Puncak dari krisis (*paceklik*) adalah pada bulan Mei-September. Salah satu karakter orang Bugis dari dulu sampai sekarang adalah malu meminta bantuan bahan makanan kepada orang lain (*masiriq*), bahkan kepada keluarga juga malu, kecuali terpaksa.

Mengenai kebutuhan pakaian, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori pas-pasan (diambang batas miskin) umumnya tidak mengeluh kebutuhan pakaian baru untuk hari raya Idul Fitri, dan untuk ke pesta. Mereka membeli dengan cara menyicil. Mereka saling percaya antara pembeli dengan penjual. Untuk pembayaran cicilan tidak ada masalah, kapan saja ada uangnya baru mereka bayar karena diantara mereka sendiri di dalam pulau yang menyicilkan. Hal itu juga didasari oleh nilai kejujuran (*lempu*) dan kepantasan (*sitinaja*). Hal yang menarik adalah orang yang menjual pakaian bukan orang dalam kampung saja, tetapi ada juga dari luar seperti dari Sigeri yang mengkreditkan barang di Pulau Salemo. Sedangkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori miskin merasa tidak mampu membeli dengan cicilan sekali pun, maka dapat mengharapkan sedekah dalam bentuk pakaian dari tetanggayang mampu atau dari anggota

keluarga yang telah berhasil di perantauannya (informasi dari kepala dusun pulau Salemo).

Tempat tinggal bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kategori pas-pasan (diambang batas miskin), umumnya layak huni, bahkan pada umumnya rumah mereka besar dan bagus. Pada kesan pertama, kami menyangka tidak banyak keluarga miskin di Pulau Salemo. Setelah mendapat informasi dari seorang pengumpul (*punggawa*) bahwa banyak orang yang rumahnya cukup besar (peninggalan masa kejayaan nelayan) tetapi kehidupan sehari-harinya pas-pasan (diambang batas miskin).

Informasi yang sama penulis peroleh juga dari kepala dusun bahwa pada masa kejayaan nelayan *gae* sekitar 30 tahun yang lalu, *pinggawa* tidak ragu-ragu memberi pinjaman pada *sawinya* yang mau membangun atau memperbaiki rumahnya. Itulah sebabnya nelayan di Pulau Salemo bagus-bagus rumahnya. Memang ada beberapa rumah yang lebih kecil daripada rumah pada umumnya, tetapi masih beratap seng dan menempati lahan sendiri. Diantara rumah kecil itu, ada yang berdinding seng, papan murah atau bambu. Kolong rumah biasanya berdinding bambu dan nampak gelap. Bagi perempuan rawan sosial ekonomi kategori miskin umumnya menempati kolong rumah tersebut tanpa membayar sewa.

Di Pulau Salemo, jumlah kepala keluarga sebanyak 378, sedangkan jumlah rumah hanya 330. Hal ini berarti terdapat 48 kepala keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri. Informasi dari beberapa informan menyatakan bahwa di Pulau Salemo ini ada banyak keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, terutama pasangan muda dan perempuan rawan sosial ekonomi kategori miskin.

3. Praktik Sekuritas Sosial di Pulau Salemo

Ada salah seorang yang terkenal sebagai pengusaha pengupasan kepiting di Pulau Salemo, yaitu Haji Arsyad yang disebut bos (*punggawa*). Dia membina puluhan nelayan kepiting (*pabbukkang*) tidak hanya nelayan di Pulau Salemo, tetapi juga dari Pulau Salemo dan pulau-pulau lain. Haji Arsyad membantu puluhan nelayan kepiting dengan membelikan peralatan tangkap dengan kewajiban menjual hasil tangkapannya kepada Haji Arsyad. Sebagian nelayan yang terikat dengan bos tersebut secara langsung dan sebagian tidak berhubungan secara langsung dengan bos tetapi melalui pengumpul (*pinggawa*). Selisih harga antara pengumpul dengan bos adalah Rp 2.000 per kilogram. Perbedaan ini menurut Pak Bahar (mantan bos) adalah saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan karena *padaidi'* (sesama anggota kerabat atau warga sendiri). Penerapan nilai *pada idi'* dalam konteks ini dapat mencegah tindakan yang bersifat mengeksploitasi terhadap anak buah.

Dari gabungan antara bantuan yang bersumber dari pemerintah (sekuritas sosial formal) dan sekuritas sosial informal dari bos maka Pak Bahar menyimpulkan bahwa umumnya nelayan kepiting yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah pada saat itu telah berada dalam kondisi antara pas-pasan dan mampu (*genneq-genneq* dan *masagena*), sebab rata-rata mempunyai lebih dari satu jenis alat tangkap sehingga dapat produktif sepanjang tahun. *De'ni gaga mapperi'e* (tidak ada lagi yang miskin). Hanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang tidak mempunyai penghasilan, tetapi *maega poncingngi* (banyak yang memberinya bantuan). Jadi mereka yang sudah mampu beralih status dari penerima bantuan ke pemberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu.

Selain bantuan kepada *pabbukkang* (pencari kepiting), Haji Arsyad juga

membuka lapangan kerja kepada 60-an anak sekolah dan perempuan rawan sosial ekonomi di Pulau Salemo. Murid-murid sekolah yang sudah tamat dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi mempunyai kesempatan kerja untuk mengupas kepiting dari jam delapan pagi sampai jam tujuh malam. Mereka yang masih sekolah mulai bekerja jam satu setelah pulang dari sekolah sampai jam tujuh malam. Tidak ada yang ditolak untuk bekerja. Hanya orang lanjut usia yang tidak ikut bekerja karena tidak tahan duduk lama.

Anak-anak sekolah yang ikut bekerja, pada umumnya dari keluarga nelayan miskin dan anak-anak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Mereka memperoleh penghasilan antara Rp.600.000,- sampai Rp.1.000.000,- perbulan. Penghasilan mereka dapat menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama bagi keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Pembukaan lapangan kerja bagi anak-anak sekolah dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi seperti ini sudah lama berlangsung di Pulau Salemo.

Orang tua dari anak-anak pengupas kepiting tersebut telah berhasil menanamkan nilai kerja keras (*reso*) kepada anak-anak mereka. Dalam komunitas nelayan Pulau Salemo ini ada satu ungkapan yang memotivasi mereka, yaitu "*makkaresopa taue nalolongenggi pappedalle"na Alla Taala*" (hanya dengan bekerja keras orang dapat memperoleh rezeki dari Allah Taala. Nilai kerja keras (*reso*) ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengusaha kepiting dan beberapa orang mampu lainnya juga membuka usaha rumput laut pada musim hujan. Usaha ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga Perempuan

Rawan Sosial Ekonomi. Mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, laki-laki dan perempuan, bekerja dalam usaha rumput laut. Mereka bekerja selama enam bulan, yaitu dari bulan Desember sampai Mei dengan penghasilan antara Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,- perhari. Tenaga mereka dibutuhkan untuk mengikat bibit pada tali yang akan direntangkan di laut. Banyak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang tertolong dengan adanya lapangan kerja ini. Lagi pula tidak mengganggu tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu sumber bantuan dari pemerintah dianggap cukup membantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah Koperasi Bina Usaha atau Koperasi Syariah, yang memperoleh dana bantuan dari Kementerian Koperasi yang diketuai oleh Pak Juhaeni (guru SD Negeri 29 Pulau Salemo). Pak Juhaeni dikenal sebagai orang yang suka menolong orang yang kesulitan. Bukan hanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang anggota koperasi minta tolong kepada dia, tetapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang bukan anggota koperasi. Mereka yang bukan anggota koperasi dibantu dengan uang pribadi. Koperasi ini beranggotakan 125 orang. Dengan status resmi dari koperasi ini maka pengelola dapat memperoleh akses kredit dari Kementerian Koperasi. Pengelola koperasi ini sangat fleksibel dalam menerapkan aturan sehingga nilai pertetangaan dan kekerabatan berlaku di dalam hubungan antara ketua koperasi dengan anggota maupun yang bukan anggota.

Koperasi tersebut banyak membantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pembelian barang campuran bagi usaha *gadde-gadde* (penjual barang). Menurut Pak Juhaeni ada lebih kurang 50 % dari anggota koperasi itu yang maju usahanya atau dapat dikatakan keluar dari

kemiskinan dengan kategori pas-pasan atau diambang batas miskin (*genneq-genneq*) sampai mampu (*masagena*). Menurut ketua koperasi, sisa sekitar 20% warga yang tergolong miskin yang umumnya bukan anggota koperasi. Mereka tidak berani meminjam pada koperasi karena khawatir akan malu (*masiri*) apabila tidak mampu membayar utangnya pada koperasi. Dengan nilai *siri* nelayan termotivasi untuk bekerja keras agar dapat membebaskan diri dari utang.

4. Sekuritas Sosial Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Selain bantuan beras miskin (*raskin*) dari pemerintah, nelayan miskin juga memperoleh sekuritas sosial bahan makanan secara tradisional. Ketika Perempuan Rawan Sosial Ekonomi tidak punya uang untuk membeli beras maka mereka tertolong oleh *Paggadde* (yang biasanya membuka kios di kolong rumah mereka). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi boleh berhutang beras dari *Paggadde* dan dibayar pada saat sudah punya uang. Menurut Pak Juhaini utang seperti itu bukan hanya beras tetapi juga gula, kopi, dan lain-lain yang bisa berlangsung sampai tiga bulan baru dibayar. Pada saat *Paggadde* kekurangan modal, sambil menunggu harga barangnya dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, mereka dapat meminta bantuan pinjaman modal dari koperasi. Menurut informasi yang kami peroleh di lapangan, tidak ada *Paggadde* yang tidak mau meminjamkan berasnya. Meskipun demikian orang yang berutang tetap merasa malu (*masiriq*) jika ingin menambah utangnya sebelum melunasi utang yang lama.

Ada juga kasus Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yaitu ST (nama inisial) yang biasa memperoleh kiriman beras dari anaknya yang menikah dengan keluarga petani dan tinggal menetap di daerah pertanian. Menurut ST bahwa anaknya

biasa mengirim atau mengantarkan beras satu karung yang berisi 20 kg. Begitu pula kalau ada keluarga dari daerah pertanian datang ke pulau untuk makan kepiting, mereka membawa beras dan dibalas dengan pemberian kepiting pada saat pulang. ST mengingat kembali kebiasaan keluarganya di Labakkang mengundang dia ikut panen atau mengirim beras sesudah panen, tetapi kebiasaan itu berubah setelah tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin (*oto*) untuk panen.

Selain sumber bantuan perolehan beras seperti disebutkan di atas, yang tidak kurang pentingnya untuk disebutkan adalah zakat fitrah di bulan ramadhan. Di Pulau Salemo umumnya orang membagikan langsung zakatnya kepada anggota kerabatnya yang dianggap miskin, dukun bayi dan guru mengaji. Tidak banyak orang yang menyerahkan zakatnya ke imam. Hal ini terjadi karena tidak ada panitia zakat (*amil*) di Pulau Salemo maka beberapa guru mengaji yang menerima zakat lebih banyak daripada imam. Contoh kasus Ibu Halijah sebagai guru mengaji menerima langsung zakat, baik dari orang tua murid yang berjumlah sekitar 50 orang, maupun dari orang-orang yang sudah tamat. Ibu Halijah dapat menerima zakat sekitar 300 liter beras per tahun. Menurut Ibu Halija, hal itu cukup bagi dia untuk konsumsi selama enam bulan bersama dengan satu orang anak perempuannya yang belum menikah dan telah berusia 50 tahun.

Di Pulau Salemo, meskipun imam tidak menerima banyak zakat, beliau tetap sebagai *amil* dan mendistribusikan kembali zakat yang diterimanya kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang selalu datang ke beliau dengan harapan diberikan zakat. Dalam distribusi zakat mereka tidak hanya berpedoman pada aturan zakat menurut syari'ah, tetapi pada nilai lokal sehingga kategori penerima zakat ditambah, yaitu dukun bayi (*sanro*

ana' lalo) dan guru mengaji (*guru pangaji*). Suhe sebagai dukun bayi (*sanro*) menerima zakat fitrah dari ibu dan bayinya selama tiga tahun dari kelahiran bayi itu. Selain itu *sanro* diantarkan juga makanan jadi pada saat bayi diaqiqah.

Kepala desa di Pulau Salemo telah menghimbau warga desa yang memiliki anggota keluarga empat orang ke atas agar menyerahkan sebagian zakatnya kepada imam. Sebagian boleh diserahkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Kepala desa mencoba untuk menambah aturan zakat yang berlaku di masyarakatnya.

Bahan makanan berupa beras yang dapat diperoleh dari berbagai pihak, orang dapat juga menikmati makanan yang sudah dimasak dalam berbagai kesempatan, anantara lain makanan untuk buka puasa di masjid sepanjang bulan ramadhan yang disediakan secara bergilir oleh warga Pulau Salemo. Bahkan ada diantara orang-orang kaya menyediakan makanan untuk buka puasa bersama di rumahnya. Begitu pula perantau yang berhasil dan kembali untuk lebaran di Pulau Salemo menyediakan makanan untuk buka puasa bersama. Tidak jarang pula orang syukuran atas keberhasilan usahanya menyediakan makanan untuk dimakan bersama di rumahnya (kasus Haji Arase yang syukuran atas hasil empangnya). Begitu pula dalam upacara yang terkait dengan lingkaran hidup (aqiqah, khitanan, perkawinan, dan kematian) orang yang datang membantu bekerja dijamu dengan makanan beraneka ragam dan ada yang dibagi-bagikan untuk dibawa pulang ke rumah.

Kebutuhan ikan untuk lauk, orang dapat memperoleh beberapa ekor secara cuma-cuma dari nelayan yang berhasil menangkap ikan dalam jumlah besar. Sebagai tanda kegembiraan mereka membagi-bagikan sebagian kepada orang yang datang menjemputnya di pinggir

pantai. Cara lain untuk memperoleh ikan dari nelayan di Pulau Salemo adalah membeli 10 atau 20 ekor ikan gamasi dan diberi tambahan beberapa ekor secara gratis. Pada kesempatan lain orang yang membantu pedagang mengeringkan ikannya, selain diberi upah berupa uang juga diberikan ikan kering untuk *pakkanreang* (lauk).

Beberapa tahun terakhir nelayan sudah kurang menangkap ikan. Di Pulau Salemo sisa sekitar sepuluh orang yang menangkap ikan. Mereka beralih ke penangkapan kepiting untuk kebutuhan pasar. Perubahan ini berdampak negatif pada kebiasaan membagikan hasil tangkapan (ikan), sementara hasil tangkapan (kepiting) tidak menjadi kebiasaan membagikannya karena hanya untuk dijual. Bahkan nelayan yang menangkap kepiting jarang mengonsumsi hasil tangkapannya.

Selain itu orang dapat membagi telur kepiting (*tello bukkang*) secara gratis dari pengusaha kepiting karena tidak laku untuk dijual ke pengusaha kepiting di Makassar, padahal itu termasuk bahan makanan yang enak dan bergizi tinggi. Biasanya anak-anak dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi membawa pulang telur kepiting dari tempat pengupasan kepiting. Berbagi ikan kering terjadi di Pulau Salemo ketika orang membantu pengusaha mengeringkan ikan di halaman rumahnya. Pemberian seperti ini didasari oleh nilai kepantasan (*assitinajang*).

Mengenai kebutuhan sayur mayur di Pulau Salemo, orang yang tidak mampu membeli di *Paggadde* kadang bisa memperoleh dari tetangganya yang punya pohon kelor dan pohon sukun yang banyak tumbuh di Pulau Salemo. Di Pulau Salemo orang tidak hanya mempunyai akses mendapatkan pemberian buah sukun dan daun/buah kelor, tetapi juga buah pepaya, nangka, pisang dan kelapa dari keluarga dan tetangganya. Saling memberi seperti

ini didukung oleh nilai pertetangga (*abbalibolang*). Bahkan bukan hanya bahan mentah yang diberikan kepada tetangga, tetapi juga biasanya yang sudah dimasak dibagikan ke tetangga terutama diantara orang yang sekerabat dekat (anak dengan orang tua, kemanakan dengan bibinya).

Penduduk di Pulau Salemo hampir seluruhnya memiliki tempat tinggal, namun orang yang tidak memiliki rumah sendiri karena mendapat bantuan dari keluarga dekat untuk tinggal di rumah atau kolong rumah keluarga dekat tanpa menyewa. Di Pulau Salemo beberapa rumah kosong karena pemiliknya pergi merantau bisa ditempati oleh anggota kerabatnya yang tidak mempunyai rumah tanpa perlu menyewa. Kasus DR (nama inisial) yang rumahnya sangat sederhana, setelah rumah saudaranya kosong maka dia pindah ke rumah itu tanpa perlu menyewa. Bahkan ada kolong rumah yang ditempati dua atau tiga keluarga. Kecenderungan menantu untuk memisahkan diri dari mertua antara lain karena hubungan mereka bersifat formal dan cenderung tegang, dan ingin menghindari (*avoidance relationship*).

Orang yang ingin mendirikan rumah sendiri umumnya mendirikan rumah di atas tanah warisan dari orang tuanya. Di Pulau Salemo masih ada juga kasus-kasus dimana orang yang tidak memiliki tanah untuk perumahan dapat memperoleh izin untuk mendirikan rumah tidak permanen di atas tanah orang lain tanpa perlu membayar sewa. Kasus Haji Arase di Pulau Salemo yang memberikan akses kepada Majid untuk mendirikan rumah di atas tanahnya tanpa perlu membayar sewa.

Untuk kebutuhan penerangan (listrik) beberapa orang yang tergolong miskin di Pulau Salemo memperoleh bantuan aliran listrik dari rumah kerabat atau tetangganya secara gratis. Bagi yang tergolong pas-pasan biasanya membayar sepantasnya

misalnya Rp5.000/bulan kepada pemilik yang berlangganan dengan PLN. Ada kasus-kasus dimana tagihan listrik dari orang tua dibayarkan oleh anak-anaknya.

Di Pulau Salemo tidak ada rumah khusus yang dibangun oleh pemerintah untuk orang-orang miskin, tetapi pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah bagi orang yang rumahnya terkena bencana alam. Kasus rumah DR di bagian utara Pulau Salemo yang pernah rusak oleh angin puting beliung diberikan sumbangan oleh pemerintah berupa seng dan pagar.

Orang yang tidak memperoleh air tawar dari sumurnya sendiri di Pulau Salemo dapat mengakses dari sumur umum dengan cara membayar Rp.15.000/bulan sebagai ganti biaya bahan bakar genset. Ada pula sumur seorang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang airnya tawar, orang tidak harus membelinya jika tidak mampu, tetapi yang mampu diharapkan bersedekah karena yang bersangkutan tidak ada yang mencarikan nafkah. Pemilik sumur tersebut menjaga baik-baik kualitas air sumurnya sehingga tidak dipakai untuk mandi dan mencuci di tempat itu. Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah telah membantu biaya pengadaan sumur umum di Pulau Salemo.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Pulau Salemo dapat membeli pakaian *cakar* (bekas) dengan harga murah, tetapi sulit membeli pakaian yang bagus-bagus dengan membayar kontan. Untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka tertolong dengan adanya penjual pakaian dimana orang bisa membeli dengan cara menyicil. Jangka waktu menyicilnya juga tidak ditetapkan. Orang bisa melunasinya kapan saja memperoleh penghasilan yang cukup memadai. Hal ini didukung oleh adanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Selain itu, orang Bugis malu

kalau sering-sering ditagih sehingga akan berusaha untuk melunasi hutangnya.

Di antara orang-orang kaya di Pulau Salemo ada yang memberikan sedekah berupa pakaian kepada anggota keluarga dan tetangganya yang miskin, terutama kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada bulan ramadhan. Di Pulau Salemo perantau yang telah berhasil di perantauan dan kembali untuk lebaran di kampung halamannya, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT mereka membagi-bagikan pakaian berupa baju, sarung, dan mukenah terutama untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan lanjut usia yang tidak mampu. Ada pun bantuan dari pemerintah terbatas pada pakaian olahraga untuk anak sekolah.

Dalam hal pengobatan, orang Salemo masih menggunakan pengobatan tradisional untuk penyakit yang dipersepsikan disebabkan oleh kekuatan gaib seperti roh halus (*tenritae*). Orang miskin di Pulau Salemo dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di PUSTU atau PUSKESMAS. Mereka dapat ke rumah sakit asalkan membawa kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dengan kartu KIS, mereka dapat meperoleh pelayanan gratis, namun resep yang diberikan oleh dokter dan dibeli di Apotik terasa mahal bagi keluarga nelayan miskin. Biaya pendidikan di Pulau Salemo disubsidi oleh pemerintah sehingga murid SD-SMA bebas dari pembayaran uang

sekolah. Buku-buku pelajaran juga bisa dipinjam dari perpustakaan sekolah. Pakaian olahraga untuk murid-murid SD gratis dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga memberikan beasiswa kepada anak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di setiap SD di Pulau Salemo yang besarnya Rp.480.000/semester. Menurut Pak Juhaini (guru SD) jumlah tersebut lebih dari kebutuhan anak yang mendapatkannya. Oleh karena jumlah penerima terbatas maka orangtua dari anak yang tidak mendapat beasiswa itu membuat permohonan agar murid-murid dari keluarga miskin diberikan beasiswa secara bergilir agar semuanya mendapatkan peluang yang sama.

Ada pun untuk pendidikan agama, terutama belajar membaca Al-Qur'an, para santri tidak perlu membayar kepada guru mengaji. Mereka diajar mengaji secara gratis karena tradisi sejak dahulu anak-anak tidak pernah membayar. Orang tua santri baru akan memberikan sejumlah uang saat anaknya telah melakukan upacara penamatan (*mappanre temme*) yang jumlahnya berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 150.000.

Secara ringkas hasil analisis tentang sekuritas sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Praktik Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Pulau Salemo.

No.	PRSE	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PRAKTIK SEKURITAS SOSIAL
1	Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan 2 kali sehari 2. Tidak dapat membeli pakaian baru 3. Tidak memiliki rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip timbal balik (<i>situlung-tulung</i>) 2. Saling mengasihi (<i>sipammase-mase</i>) 3. Kepantasan (<i>assitinajang</i>)

2.	Pas-pasan (diambang batas miskin)	1. Makan dua kali sehari 2. Dapat membeli pakaian baru sekali setahun 3. Memiliki rumah sangat sederhana	4. Saling mengunjungi (<i>silokkai</i>) 5. Bantuan modal dari Bos (<i>punggawa</i>) 6. Bantuan modal dari Koperasi (pemerintah) 7. Bantuan RASKIN 8. Beasiswa kepada anak PRSE 9. Pelayanan kesehatan melalui KIS
----	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Primer, 2018

D. Kesimpulan

Hasil penelitian pada komunitas nelayan di Pulau Salemo Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Topabbiring Utara menunjukkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai, baik menurut norma adat setempat, maupun menurut standar nasional.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka yang dapat diamati adalah rumah-rumah yang tampak kumuh, lingkungan perumahan yang kotor, air mandi dan cuci yang kurang bersih, pendidikan anak-anaknya yang kebanyakan hanya sampai tingkat SD, pada musim pacekliknya hanya makan dua kali sehari dengan kondisi makanan yang sekedar dapat mengenyangkan. Dalam perawatan kesehatan masih menggunakan pengobatan tradisional disamping mengakses pengobatan modern.

Dalam praktik sekuritas sosial yang berhubungan dengan peningkatan penghasilan berlaku prinsip timbal balik (*situlung-tulung*) yang bersifat rasional yang penuh dengan perhitungan, dimana pihak *punggawa* dan *bos* berusaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal bantuan bahan makanan berlaku nilai-nilai kepatutan (*sitinaja*), kewajiban moral bagi keluarga yang bertani (tempo dulu) untuk memberikan tambahan atau hadiah (*pabbere*) disamping upah (*saro*), yang

telah nyaris hilang dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir sesudah petani menggunakan mesin pemotong padi (*oto*). Akhirnya bantuan bahan makanan (beras) diperoleh melalui mekanisme pasar yaitu membeli secara kredit pada *paggadde* (penjual dengan kios di kolong rumah). *Paggadde* memerikan keringanan untuk membayar belakangan dengan prinsip tolong-menolong sebagai kewajiban moral. Ada pun pemberian beras yang bersumber dari lembaga zakat diatur oleh aturan syari'ah, tetapi juga dipengaruhi norma adat yang berlaku, misalnya orang tua bayi memberikan zakatnya kepada dukun bayi (*sanro pemmanaq*) dan murid mengaji menyerahkan zakatnya kepada gurunya, sedangkan bantuan beras dari pemerintah berlaku aturan pemerintah yang dalam banyak kasus dipengaruhi pula oleh aturan adat.

Praktik sekuritas sosial yang berkenaan dengan bantuan tempat tinggal berlaku nilai luhur saling mengasihi (*sipammase-mase*) dan nilai kepatutan (*assitinajang*). Nilai *sipammase-mase* dalam hal ini, yaitu memberi bantuan kepada orang yang belum punya tempat tinggal untuk mendiami kolong rumah penduduk yang sudah punya rumah tanpa dipungut biaya. Nilai *assitinajang* dalam hal ini, yaitu memberi bantuan tempat tinggal yang layak dihuni. Hal ini terutama berlaku dalam keluarga luas, yang akhir-akhir ini cenderung mengarah ke keluarga kecil dan pengaturan ruang mulai bergeser ke kolong rumah (*awa bola*).

Dalam hal pemanfaatan lahan untuk perumahan, komunitas nelayan di Pulau Salemo masih ditemukan beberapa kasus pemberian izin mendirikan rumah di atas lahan *punggawa* yang didasari oleh nilai belas-kasih (*esse babua*) dan kepatasan (*assitinajang*). Selain itu, berlaku aturan atau kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan berupa seng, balok dan papan untuk rumah yang terkena bencana dan bedah rumah.

Dalam pelayanan kesehatan, masyarakat atau kerabat dekat mengunjungi dan memberi bantuan kepada anggota masyarakat atau kerabat yang sakit, melahirkan, khitanan dan kematian. Dalam hal ini berlaku aturan adat saling mengunjungi (*silokkai*). Pemberian bantuan yang besar jumlahnya diantara orang yang sekerabat dekat, terutama dalam acara khitanan. Jumlah bantuan mencapai jutaan rupiah dari perorangan yang didasari oleh prinsip timbal-balik (*situlung-tulung*). Pada saat ini pelayanan kesehatan yang diatur oleh kebijakan pemerintah menjadi berarti sekali dan cukup merata (sekitar 85%) dari penduduk di tiga lokasi tersebut menggunakan KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Bantuan pembiayaan pendidikan di Pulau Salemo yang nelayannya menangkap kepiting terdapat mekanisme pemberian kesempatan kerja kepada anak sekolah dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berupa mengupas kepiting.

Adanya kategorisasi miskin (*mapari*), pas-pasan (*genneq-genneq*), mampu (*masagena*) dan kaya (*sugi*) menurut norma lokal. Untuk mengatasi kemiskinan terdapat hubungan sosial (kekerabatan, *punggawa-sawi*) dan institusi-institusi agama (zakat) dan pemerintah.

Saran

Kepada pemerintah untuk memberikan jaminan sekuritas sosial bagi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada komunitas nelayan pulau kecil, yaitu:

1. Perlu dilakukan pendataan secara cermat tentang kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin dan pas-pasan (diambang batas miskin). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pas-pasan (diambang batas miskin) dianggap perlu juga didata karena posisinya cukup rentan turun jadi miskin pada saat terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dalam rentang waktu yang panjang. Di Desa Mattiro Bombang, pendataan tentang jumlah pra sejahtera yang mencakup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi miskin belum lengkap data basisnya.
2. Kecenderungan pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang mendasari praktik sekuritas sosial informal/tradisional, maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan anggaran yang dialokasikan kepada warga komunitas nelayan miskin, terutama untuk peningkatan pendapatan, sehingga mereka tidak berutang pada *paggadde-gadde*. Selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup investasi di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan, khususnya masyarakat dan pemerintah di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Masyarakat dan pemerintah di Pulau Salemo dengan tulus telah memberikan informasi dan inspirasi kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah membiayai penelitian ini. Dengan dimuatnya hasil penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada editor, pimpinan redaksi dan seluruh staf Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (PKS), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Segala konsekuensi dari naskah artikel ini adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh penulis.

Pustaka Acuan

- Ahmed Ali, Muhammad, dkk, 2012. *Socio-Economic Analysis Of The Interventions Aimed At Improving Water and Sanitation Condition Of Rural Community*, Research on Humanities and Social Sciences, ISSN 2222-1719 (Paper) ISSN 2222-2863, Vol2, No. 10.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2018. *Berita Resmi Statistik*. Nomor 57/07/Th.XXI. 16 Juli 2017.
- Bayo, Andre (Editor), 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Benda-Beckmann, F.von , et. al. 1988. *Between Kinship and the State: Social Security and Law in Developing Countries*. Dordrecht: Foris Publications.
- Depsos RI, 2005. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Tahun 2006-2010.
- Imran Qureshi, Muhammad, dkk, 2012. *Ensuring the Role and Impact: Reaching the Poorest While Alleviating the Poverty by Micro Finance in Dera Ismail Khan KPK Pakistan, Developing Country Studies*, ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online), Vol 2, No. 4.
- Kemensos RI, 2012. *Kementerian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Mafruhah, Izza. 2009. *Multi Dimensi Kemiskinan*. Surakarta: LPP UNS.
- Nweke, Eugene N, 2012. *Increase of Extreme Poverty and Hunger in the context of Millenium Development Goals (MDGs) in Nigeria: (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)*, *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 1, JULI 2009: 1-12*
- Peraturan Mensos RI, Nomor 8 Tahun 2012.
- Suharto, Edi 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reika Aditama.
- Tang, Mahmud, 2002. *Studi Perlindungan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*: BAPPENNAS.
- Tang, Mahmud, 2005, dkk. *Kajian Sekuritas Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin di Kota Parepare Sulawesi Selatan, Kota Baubau Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate Maluku Utara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial RI.
- Tang, Mahmud. 2012. "Plural Forms of Social Security on the Fisherman Communities in Salemo Island District Pangkep South Sulawesi and Rangas Barat District Majene West Sulawesi" paper pada *The 3rd CILS International Conference 2012 on 26th-27th November 2012*. Makassar, Indonesia
- Tang, Mahmud, dkk. 2016. *Kajian Sistem Budaya Maritim yang Mendasari Sekuritas Sosial Pada Komunitas Nelayan di Pesisir Pantai dan Pulau Kecil di Sulawesi Selatan*. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, LP2M Unhas.
- Woodman, G.R. 1988. "The Decline of Folk Law Social Security in Common Law Africa", in F. and K. Von Benda-Beckmann (eds.) *Between Kinship and the State: Social Security and Law in Developing Countries*, pp. 69-88, Dordrecht: Foris Publications.

Internet

Kementerian Sosial RI - Database.
<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmk...>